

INSPEKTORAT

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

Jalan Pramuka Nomor 33
Jakarta 13120

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat BPKP adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat BPKP. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2018

Inspektur, *Ar.*



Buntoro

NIP 19650118 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	17
B.2. Belanja Negara	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Aset Lancar	23
C.2. Aset Tetap	24
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	26
C.4. Ekuitas	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	28
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1. Ekuitas Awal	35
E.2. Surplus/(Defisit) LO	35
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	35
E.4. Transaksi Antar Entitas	35
E.5. Ekuitas Akhir	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2017	18
Tabel 2 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016	18
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2017	19
Tabel 4 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2017	19
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016	20
Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016	20
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016	21
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2017	21
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016	22
Tabel 10 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016	23
Tabel 11 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016	23
Tabel 12 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016	24
Tabel 13 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017	26
Tabel 14 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016	26
Tabel 15 : Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016	28
Tabel 16 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016	29
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2017 Menurut LO dan LRA	29
Tabel 18 : Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016	30
Tabel 19 : Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016	30
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 Menurut LO dan LRA	31
Tabel 21 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016	31
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2017 Menurut LO dan LRA	32
Tabel 23 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016	32
Tabel 24 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016	33
Tabel 25 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Neraca Percobaan
 - B. Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Neraca
 - D. Laporan Operasional
 - E. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat BPKP yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2018

Inspektur, *AS*



Buntoro

NIP 19650118 198503 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.423.080,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp6.932.916.126,00 atau mencapai 91,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.544.296.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Tahun Anggaran 2017.

Nilai Aset Tahun Anggaran 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp309.074.509,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp84.136.564,00 dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp224.937.945,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.048.932,00 dan Rp308.025.577,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp7.013.219.510,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp7.013,219.510,00). Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar Rp3.136.003,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2017 Inspektorat BPKP mengalami Defisit-LO sebesar (Rp7.010.083.507,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp387.616.038,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.010.083.507,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.930.493.046,00 sehingga Ekuitas Inspektorat BPKP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp308.025.577,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT BPKP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017			TA 2016 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	2.423.080	~	468.724
Jumlah Pendapatan		0	2.423.080	~	468.724
BELANJA	B.2				
■ Belanja Pegawai	B.2.1	5.835.500.000	5.709.762.684	97,85	6.162.929.754
■ Belanja Barang	B.2.2	1.708.796.000	1.223.153.442	71,58	2.850.091.672
Jumlah Belanja		7.544.296.000	6.932.916.126	91,90	9.013.021.426

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

**INSPEKTORAT BPKP
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
■ Persediaan	C.1.1	84.136.564	27.920.393
JUMLAH ASET LANCAR		84.136.564	27.920.393
ASET TETAP	C.2		
■ Peralatan dan Mesin	C.2.1	2.114.903.876	2.114.903.876
■ Aset Tetap Lainnya	C.2.2	22.692.925	22.692.925
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.3	(1.912.658.856)	(1.776.941.798)
JUMLAH ASET TETAP		224.937.945	360.655.003
JUMLAH ASET		309.074.509	388.575.396
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.3		
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	1.048.932	959.358
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.048.932	959.358
JUMLAH KEWAJIBAN		1.048.932	959.358
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.4.1	308.025.577	387.616.038
JUMLAH EKUITAS		308.025.577	387.616.038
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		309.074.509	388.575.396

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

INSPEKTORAT BPKP LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
D.1			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
D.1.1			
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	0	29.640
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1	0	29.640
BEBAN OPERASIONAL			
D.1.2			
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	5.709.852.258	6.153.934.030
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	57.691.052	77.222.464
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	284.658.924	246.408.784
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	73.225.283	106.633.194
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	752.074.935	2.412.808.094
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	135.717.058	160.606.924
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	7.013.219.510	9.157.613.490
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1- D.1.2)	D.1	(7.013.219.510)	(9.157.583.850)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.2			
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
D.2.1			
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	3.154.004	617.084
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	18.001	590.001
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1 s.d. D.2.1.2)	D.2.1	3.136.003	27.083
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1)	D.2	3.136.003	27.083
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (D.1+D.2)		(7.010.083.507)	(9.157.556.767)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT BPKP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
EKUITAS AWAL	E.1	387.616.038	425.269.613
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(7.010.083.507)	(9.157.556.767)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI NILAI EKUITAS	E.3		
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	0	626.058
Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Nilai Ekuitas		0	626.058
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	6.932.916.126	9.013.021.426
■ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(2.423.080)	(468.724)
■ Transfer Masuk	E.4.3	0	106.724.432
Jumlah Transaksi Antar Entitas		6.930.493.046	9.119.277.134
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)		(79.590.461)	(37.653.575)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	308.025.577	387.616.038

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Inspektorat BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat BPKP;
- b. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat BPKP;
- c. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- d. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
- e. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
- f. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
- g. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
- h. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPKP;
- i. Pemantauan tindak lanjut hasil audit di Lingkungan BPKP; dan
- j. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat BPKP.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Inspektorat berkomitmen dengan visi ***“Auditor Intern BPKP yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Kinerja BPKP”***.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis BPKP Tahun 2015–2019 maka dalam penyusunan kebijakan pengawasan Inspektorat BPKP mengacu pada tiga Program Utama yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

✦ Inspektur	: Buntoro
✦ Kasubbag Tata Usaha	: Antonius Rony

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Inspektorat BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Inspektorat BPKP adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - ✓ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

e. Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal dengan satuan mata uang Rupiah.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

2) Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

3) Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

4) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	75

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akuntansi penyusutan.

f. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pagu anggaran Inspektorat BPKP Tahun 2017 sebesar Rp8.143.974.000,00 telah direvisi sebesar (Rp599.679.000,00) menjadi Rp7.544.296.000,00

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja BPKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0
Pendapatan Jasa	0	0
Total Pendapatan	0	0
BELANJA		
Belanja Pegawai	6.403.573.000	5.835.500.000
Belanja Barang	1.740.401.000	1.708.796.000
Belanja Modal	0	0
Total Belanja	8.143.974.000	7.544.296.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	6.999.466.000	6.531.393.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.144.508.000	1.012.903.000
Total	8.143.974.000	7.544.296.000

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp2.423.080,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.423.080,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Inspektorat BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2017

No	Uraian Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan Pengelolaan BMN	0	0	~
2.	Pendapatan Lain-Lain	0	2.423.080	~
	Jumlah	0	2.423.080	~

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.954.356,00 yang disebabkan adanya kenaikan pendapatan lain-lain.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2017 dan 2016

No.	Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP		Naik / (Turun)	
		TA 2017	TA 2016	Rp	%
1.	Pendapatan Pengelolaan BMN	0	29.640	(29.640)	(100)
2.	Pendapatan Lain-Lain	2.423.080	439.084	1.983.996	451,85
	Jumlah Netto	2.423.080	468.724	1.954.356	416,95

Pendapatan Lain-lain merupakan pendapatan atas pengembalian belanja persekot/uang muka gaji pegawai, pengembalian belanja uang makan, pengembalian belanja barang dan pendapatan anggaran lainnya.

Realisasi Belanja
Negara
Rp6.932.916.126,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Inspektorat BPKP Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.932.916.126,00 atau 91,90 persen dari anggaran sebesar Rp7.544.296.000,00.

Anggaran dan realisasi Belanja menurut program Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2017

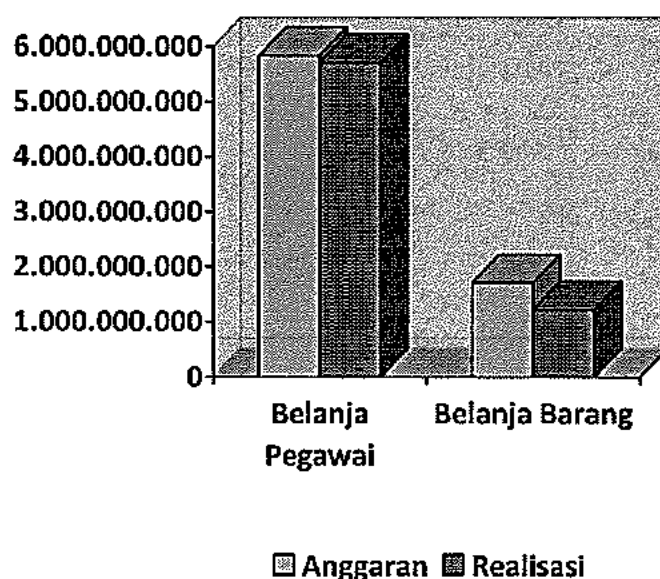
Jumlah Pagu	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	6.531.393.000	6.214.835.901	96,15
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.012.903.000	718.080.225	70,89
Total	7.544.296.000	6.932.916.126	91,90

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2017

Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Kode	Uraian			
51	Belanja Pegawai	5.835.500.000	5.709.762.684	97,85
52	Belanja Barang	1.708.796.000	1.223.153.442	71,58
	Jumlah	7.544.296.000	6.932.916.126	91,90

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 disajikan pada grafik berikut ini:



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp2.080.105.300,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2016 disebabkan adanya penurunan Belanja Pegawai dan penurunan Belanja Barang. Untuk tahun 2017 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal.

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

Jenis Belanja		Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
Kode	Uraian	TA 2017	TA 2016	Rp	%
51	Belanja Pegawai	5.709.762.684	6.162.929.754	(453.167.070)	(7,35)
52	Belanja Barang	1.223.153.442	2.850.091.672	(1.626.938.230)	(57,08)
	Jumlah	6.932.916.126	9.013.021.426	(2.080.105.300)	(23,08)

Belanja Pegawai
Rp5.709.762.684,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.709.762.684,00 dan Rp6.162.929.754,00. Penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.080.105.300,00 atau 23,08 persen. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	2.766.860.000	2.704.647.590	97,75
Belanja Lembur	80.640.000	44.488.000	55,17
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.988.000.000	2.960.627.094	99,08
Total	5.835.500.000	5.709.762.684	97,85

Realisasi Belanja Pegawai Bruto adalah sebesar Rp5.729.202.262,00 sedangkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp19.439.578,00, sehingga realisasi belanja netto sebesar Rp5.709.762.684,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, terdapat penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp453.167.070,00 atau 7,35 persen karena adanya pegawai yang mutasi dan pensiun pada tahun yang berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2017	TA 2016	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	2.704.647.590	2.979.279.324	(274.631.734)	(9,22)
Belanja Lembur	44.488.000	23.826.000	20.662.000	86,72
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.960.627.094	3.159.824.430	(199.197.336)	(6,30)
Realisasi Belanja Netto	5.709.762.684	6.162.929.754	(453.167.070)	(7,35)

Belanja Barang
Rp1.223.153.442,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.1.223.153.442,00 dan Rp2.850.091.672,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	284.358.000	248.953.124	87,55
Belanja Barang Non Operasional	78.706.000	32.105.800	40,79
Belanja Barang Persediaan	119.834.000	113.194.300	94,46
Belanja Jasa	14.304.000	3.600.000	25,17
Belanja Pemeliharaan	78.674.000	73.225.283	93,07
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.132.922.000	752.074.935	66,38
Total	1.708.796.000	1.223.153.442	71,58

Realisasi Belanja Barang Bruto adalah sebesar Rp1.224.576.342,00 sedangkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp1.422.900,00, sehingga realisasi belanja netto sebesar Rp1.223.153.442,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, terdapat penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.626.938.230,00 atau minus 57,08 persen antara lain disebabkan terdapat *Self Blocking* sehingga dilakukan penghematan anggaran. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
	TA 2017	TA 2016	Rp	%
Belanja Barang Operasional	248.953.124	190.848.910	58.104.214	30,45
Belanja Barang Non Operasional	32.105.800	51.659.874	(19.552.074)	(37,85)
Belanja Barang Persediaan	113.194.300	84.241.600	28.952.700	34,37
Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.900.000	(300.000)	(7,69)
Belanja Pemeliharaan	73.225.283	106.633.194	(33.407.911)	(31,33)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	752.074.935	2.412.808.094	(1.660.733.159)	(68,83)
Realisasi Belanja Netto	1.223.153.442	2.850.091.672	(1.626.938.230)	(57,08)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp84.136.564,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.84.136.564,00 dan Rp27.920.393,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
Persediaan	84.136.564	27.920.393
Jumlah	84.136.564	27.920.393

Persediaan
Rp84.136.564,00

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.84.136.564,00 dan Rp27.920.393,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Kode	Jenis Persediaan	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	84.136.564	27.920.393
	Jumlah	84.136.564	27.920.393

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp84.136.564,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp224.937.945,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.224.937.945,00 dan Rp360.655.003,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.114.903.876	2.114.903.876
2	Aset Tetap Lainnya	22.692.925	22.692.925
Nilai Perolehan		2.137.596.801	2.137.596.801
Akumulasi Penyusutan		(1.912.658.856)	(1.776.941.798)
Nilai Buku		224.937.945	360.655.003

Peralatan dan
Mesin
Rp2.114.903.876,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.114.903.876,00. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.912.658.856,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp202.245.020,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	2.114.903.876
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.114.903.876
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(1.912.658.856)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	202.245.020

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.994.000,00, sedangkan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.994.000,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp22.692.925,00

C.2.2. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp22.692.925,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset tetap lainnya berupa 318 (tiga ratus delapan belas) unit bahan perpustakaan dan 3 (tiga) unit barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, sehingga nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp22.692.925,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	22.692.925
Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	22.692.925
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	22.692.925

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp1.912.658.856,0
0)

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.912.658.856,00 dan Rp1.776.941.798,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.114.903.876	1.912.658.856	202.245.020
2	Aset Tetap Lainnya	22.692.925	0	22.692.925
	Jumlah	2.137.596.801	1.912.658.856	224.937.945

Perbandingan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2017 dan 2016 terdapat selisih sebesar Rp135.717.058,00. Selisih tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)	Mutasi Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.912.658.856	1.776.941.798	135.717.058
	Jumlah	1.912.658.856	1.776.941.798	135.717.058

Sedangkan beban penyusutan tahun 2017 sebesar Rp135.717.058,00 sehingga tidak terdapat selisih.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.048.932,00*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.1.048.932,00 dan Rp959.358,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Des 2017 (Rp)	31 Des 2016 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.048.932	959.358
	Jumlah	1.048.932	959.358

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp1.048.932,00*

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.1.048.932,00 dan Rp959.358,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar yaitu kekurangan gaji pegawai yang masih belum dibayarkan pada tahun 2017.

C.4. Ekuitas

Ekuitas
Rp308.025.577,00

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.308.025.577,00 dan Rp387.616.038,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp7.013.219.510,0
0)*

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp.7.013.219.510,00 dan minus Rp9.157.583.850,00.

*Pendapatan
Operasional
Rp0,00*

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp29.640,00.

*Beban Operasional
Rp7.013.219.510,00*

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.013.219.510,00 dan Rp9.157.613.490,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Pegawai	5.709.852.258	6.153.934.030	(444.081.772)	(7,21)
Beban Persediaan	57.691.052	77.222.464	(19.531.412)	(25,29)
Beban Barang dan Jasa	284.658.924	246.408.784	38.250.140	15,52
Beban Pemeliharaan	73.225.283	106.633.194	(33.407.911)	(31,32)
Beban Perjalanan Dinas	752.074.935	2.412.808.094	(1.660.733.159)	(68,82)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.717.058	160.606.924	(24.889.866)	(15,50)
Jumlah	7.013.219.510	9.157.613.490	(2.144.393.980)	(132,64)

D.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp5.709.852.258,00*

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.5.709.852.258,00 dan Rp6.153.934.030,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.704.737.164	2.970.283.600	(265.546.436)	(8,94)
Beban Uang Lembur	44.488.000	23.826.000	20.662.000	86,72
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.960.627.094	3.159.824.430	(199.197.336)	(6,30)
Jumlah	5.709.852.258	6.153.934.030	(444.081.772)	(7,22)

Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp89.574,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2017 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.704.737.164	2.704.647.590	89.574
Beban Lembur	44.488.000	44.488.000	0
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	2.960.627.094	2.960.627.094	0
Total	5.709.852.258	5.709.762.684	89.574

Selisih realisasi sebesar Rp89.574,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran tahun 2017 atas beban tahun 2016	(959.358)
Belanja pegawai yang belum dibayar pada tahun 2016	1.048.932
Jumlah	89.574

Beban Persediaan
Rp57.691.052,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp57.691.052,00 dan

Rp77.222.464,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2016	Tahun 2015	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Barang Konsumsi	57.691.052	77.222.464	(19.531.412)	(25,29)
Total	57.691.052	77.222.464	134.913.516	(25,29)

Realisasi Belanja Persediaan tahun 2017 menurut Laporan realisasi Anggaran sebesar Rp113.194.300, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp57.691.052,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama tahun 2017.

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp284.658.924,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp284.658.924,00 dan Rp246.408.784,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	248.953.124	190.848.910	58.104.214	30,45
Beban Barang Non Operasional	32.105.800	51.659.874	(19.554.074)	(37,85)
Beban Jasa	3.600.000	3.900.000	(300.000)	(7,69)
Total	284.658.924	246.408.784	38.250.140	15,52

Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak

terdapat selisih antara LO dan LRA sebagaimana disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	248.953.124	248.953.124	-
Beban Barang Non Operasional	32.105.800	32.105.800	-
Beban Jasa	3.600.000	3.600.000	-
Total	284.658.924	284.658.924	

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp73.225.283,00

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp73.225.283,00 dan Rp106.633.194,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.225.283	106.633.194	(33.407.911)	(31,32)
Jumlah	73.225.283	106.633.194	(33.407.911)	(31,32)

Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih antara LO dan LRA sebagaimana disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2017 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.225.283	73.225.283	-
Total	73.225.283	73.225.283	-

Beban Perjalanan Dinas
 Rp752.074.935,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp752.074.935,00 dan Rp2.412.808.094,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Perjalanan Biasa	543.302.935	1.958.129.094	(1.414.826.159)	(72,25)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.690.000	44.050.000	1.640.000	3,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159.900.000	409.240.000	(249.340.000)	(60,92)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.182.000	1.389.000	1.793.000	129,08
Jumlah	752.074.935	2.412.808.094	(1.660.733.159)	(68,82)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2017 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
 Rp135.717.058,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp135.717.058,00 dan Rp160.606.924,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*)

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik/(Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135.717.058	160.606.924	(24.889.866)	(15,49)
Jumlah	135.717.058	160.606.924	(24.889.866)	(15,49)

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp3.136.003,00*

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.136.003,00 dan Rp27.083,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.136.003,00.

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp3.136.003,00*

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.136.003,00 dan Rp27.083,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp3.154.004,00*

D.2.1.2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.154.004,00 dan Rp617.084,00. Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2017	Tahun 2016	Jumlah	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.733.080	439.084	1.293.996	294,70
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	690.000	0	690.000	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	730.924	178.000	552.924	310,63
Jumlah	3.154.004	617.084	2.536.920	411,11

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp18.001,00

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18.001,00 dan Rp590.001,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 tersebut merupakan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp387.616.038,00*

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp387.616.038,00 dan Rp425.269.613,00.

*Surplus/(Defisit)
LO
(Rp7.010.083.507,00)*

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar minus Rp7.010.083.507,00 dan Rp9.157.556.767,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp7.010.083.507,00, sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas Rp0,00*

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan minus Rp626.058,00.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0,00*

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp626.058,00. Jumlah tersebut merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan sehubungan dengan update aplikasi Simak BMN.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp6.930.493.046,00*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.930.493.046,00 dan Rp9.119.277.134,00.

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 terdiri atas:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.932.916.126
Diterima dari Entitas Lain	(2.423.080)
Transfer Masuk dari BPKP Pusat	0
Jumlah	6.930.493.046

*Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp6.932.916.126,00*

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan

2016 masing-masing sebesar Rp.6.932.916.126,00 dan Rp9.013.021.426,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2017.

*Diterima dari
Entitas Lain
(Rp2.423.080,00)*

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp2.423.080,00 dan minus Rp468.724,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja serta dari penerimaan negara lainnya sampai dengan 31 Desember 2017.

*Transfer Masuk
Rp0,00*

E.4.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp 106.724.432,00.

*Ekuitas Akhir
Rp308.025.577,00*

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp308.025.577,00 dan Rp387.616.038,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp309.074.509,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp1.048.932,00.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat Penugasan Inspektorat BPKP yang didanai dari DIPA mitra kerja.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIKT
 Tanggal : 31-01-18
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117111	Barang Konsumsi	84,136,564	
0	132111	Peralatan dan Mesin	2,114,903,876	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	22,692,925	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1,912,658,856
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		1,048,932
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		6,932,916,126
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,423,080	
0	391111	Ekuitas		387,616,038
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		1,733,080
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		690,000
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		730,924
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,864,277,000	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,282	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		370
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	148,888,820	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	44,221,536	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	49,270,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	271,480,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,295,726	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	89,149,020	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	218,644,000	
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS		104,850
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,595,000	
3	512211	Beban Uang Lembur	44,488,000	
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,979,981,452	
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		19,334,358
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	130,003,624	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,069,500	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116,880,000	
3	521211	Beban Bahan	23,945,800	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	
3	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73,225,283	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 31-01-18
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	544,725,835	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		1,422,900
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,690,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159,900,000	
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,182,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135,717,058	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	57,691,052	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	18,001	
		J U M L A H	9,258,256,434	9,258,256,434

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 31-01-18
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	611,379,874	
0	219711	Utang Kepada KUN	2,423,080	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		1,889,147,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		23,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		150,902,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		46,000,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		49,620,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		284,000,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		12,422,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		93,257,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		227,160,000
2	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri		7,714,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		6,615,000
2	512211	Allotment Belanja Uang Lembur		80,640,000
2	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		2,988,000,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		165,076,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		2,400,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		116,880,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		70,546,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		8,160,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		119,834,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		14,304,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		78,674,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		695,878,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		90,660,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		338,800,000
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		7,584,000
3	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		1,733,080
3	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		690,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,864,247,500	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,253	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		370

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 31-01-18
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	148,854,110	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,219,490	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	49,270,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	271,480,000	
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,272,437	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89,149,020	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	218,644,000	
3	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		104,850
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,595,000	
3	512211	Belanja Uang Lembur	44,488,000	
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,979,961,452	
3	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		19,334,358
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	130,003,624	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,069,500	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	116,880,000	
3	521211	Belanja Bahan	23,945,800	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	113,194,300	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73,225,283	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	544,725,835	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		1,422,900
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,690,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	159,900,000	
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,182,000	
		J U M L A H	7,567,581,558	7,567,581,558

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	2,423,080	2,423,080	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,423,080	2,423,080	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,423,080	2,423,080	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	5,835,500,000	5,709,762,684	(125,737,316)	97.85
	Belanja Barang	1,708,796,000	1,223,153,442	(485,642,558)	71.58
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	7,544,296,000	6,932,916,126	(611,379,874)	91.90
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Jakarta, 31 Desember 2017

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Rony

NIP. 19751106 199601 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROPINSI : 0199
SATUAN KERJA : 551994
JENIS KEWENANGAN : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
INSTANSI PUSAT
INSPEKTORAT BPKP
KANTOR PUSAT

Kantor Pusat
Tangerang
11 Januari 2018
Halaman 1 dari 1

No	URAIAN	2017					2016				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	2,423,080	2,423,080	0.00	0	468,724	468,724	0.00		
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,423,080	2,423,080	0.00	0	468,724	468,724	0.00		
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,423,080	2,423,080	0.00	0	468,724	468,724	0.00		
B	BELANJA NEGARA										
B.1.1	Rupiah Murni	7,544,256,000	6,832,916,126	(611,379,874)	91.90	9,552,844,000	9,013,021,425	(839,822,574)	91.48		
B.1.1.a	Belanja Pegawai	5,835,500,000	5,709,792,684	(125,737,316)	97.85	6,403,573,000	6,162,928,754	(240,643,246)	96.24		
B.1.1.b	Belanja Barang	1,708,796,000	1,223,153,442	(485,642,558)	71.58	3,449,271,000	2,850,091,672	(599,179,328)	82.83		
B.1.1.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH BELANJA	7,544,256,000	6,832,916,126	(611,379,874)	91.90	9,552,844,000	9,013,021,425	(839,822,574)	91.48		
C	PEMBIAYAAN										
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROPINSI : 0199
SATUAN KERJA : 651994
JENIS KEWENANGAN : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
INSTANSI PUSAT
INSPEKTORAT BPKP
KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 31 Januari 2018
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2017					2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	


 Jakarta, 31 Desember 2017
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Antonius Rony
 NIP. 19751106 199601 1 001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIET
 Tanggal : 31/01/18
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	84,136,564	27,920,393	56,216,171	201.34
JUMLAH ASET LANCAR	84,136,564	27,920,393	56,216,171	201.34
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,114,903,876	2,114,903,876	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	22,692,925	22,692,925	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(1,912,658,856)	(1,776,941,798)	(135,717,058)	7.63
JUMLAH ASET TETAP	224,937,945	360,655,003	(135,717,058)	(37.63)
JUMLAH ASET	309,074,509	388,575,396	(79,500,887)	(20.45)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,048,932	959,358	89,574	9.33
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,048,932	959,358	89,574	9.33
JUMLAH KEWAJIBAN	1,048,932	959,358	89,574	9.33
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	308,025,577	387,616,038	(79,590,461)	(20.53)
JUMLAH EKUITAS	308,025,577	387,616,038	(79,590,461)	(20.53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	309,074,509	388,575,396	(79,500,887)	(20.45)

Jakarta, 31 Desember 2017
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha


 Antonius Rony
 NIP. 19751106 199601 1 001

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 DAN 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	29,640	(29,640)	100.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	29,640	(29,640)	(100.00)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	0	29,640	(29,640)	100.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	5,709,852,258	6,153,934,030	(444,081,772)	(7.21)
Beban Persediaan	57,691,052	77,222,464	(19,531,412)	(25.29)
Beban Barang dan Jasa	284,858,924	246,408,784	38,250,140	15.52
Beban Pemeliharaan	73,225,283	106,633,194	(33,407,911)	(31.32)
Beban Perjalanan Dinas	752,074,935	2,412,808,094	(1,660,733,159)	(68.82)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	135,717,058	160,606,924	(24,889,866)	(15.49)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	7,013,219,510	9,157,613,490	(2,144,393,980)	(132.64)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 DAN 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,013,219,510)	(9,157,583,850)	2,144,364,340	232.64
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,154,004	617,084	2,536,920	(411.11)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18,001	590,001	(572,000)	(96.94)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,136,003	27,083	3,108,920	11,479.23
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,136,003	27,083	3,108,920	(314.16)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(7,010,083,507)	(9,157,556,767)	2,147,473,260	(81.52)

Jakarta, 31 Desember 2017
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha


 Antonius Rony
 NIP. 19751106 199601 1 001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP

JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	387,616,038	425,269,613	(37,653,575)	(8.85)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,010,083,507)	(9,157,556,767)	2,147,473,260	(23.45)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	626,058	(626,058)	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	626,058	(626,058)	(100.00)
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,930,493,046	9,119,277,134	(2,188,784,088)	(24.00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(79,590,461)	(37,653,575)	(41,936,886)	111.37
EKUITAS AKHIR	308,025,577	387,616,038	(79,590,461)	(20.53)

Jakarta, 31 Desember 2017
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha


 Antonius Rony
 NIP. 19751106 199601 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP
 JENIS SAKTER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.T01
 TANGGAL : 31/01/18
 HAL : 1
 PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI 5	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI 6	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TRANSAKSI KAS						
42	Penerimaan Dalam Negeri						
423	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		1,733,080	1,733,080	0	1,733,080	0.00
4239	PNBP LAINNYA		690,000	690,000	0	690,000	0.00
42395	Pendapatan Lain-lain		2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
423951	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,733,080	1,733,080	0	1,733,080	0.00
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	690,000	690,000	0	690,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42395	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	Jumlah Penerimaan 4239	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	Jumlah Penerimaan 423	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,423,080	2,423,080	0	2,423,080	0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN

UNTUK TAHUN 2017
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
 ESELON I : 01
 WILAYAH/PROPINSI : 0199
 SATUAN KERJA : 651994
 JENIS SATKER : XX

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI/PUSAT
 INSPEKTORAT BPKP
 Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPE.T01b
 TANGGAL : 31/01/18
 HAL : 1
 PROG. ID : lue_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7
		----- Tidak Ada Data Yang Dicetak -----				

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 31 Januari 2018
 Halaman : 1
 Prog.Id : lu_rabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH SID TAHUN INI	PENGEMBALIAN SID TAHUN INI	JUMLAH NETO SID TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
01	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP								
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,096,880,000	1,989,147,000	1,964,247,500	1,964,247,500	0	1,964,247,500	98.68	24,899,500
511119	Belanja Pembulanan Gaji PNS	95,000	23,000	21,253	21,253	(370)	20,883	90.80	2,117
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	181,902,000	150,902,000	148,854,110	148,854,110	0	148,854,110	96.64	2,047,890
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	55,000,000	45,000,000	44,219,490	44,219,490	0	44,219,490	96.13	1,780,510
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	60,620,000	48,620,000	48,270,000	48,270,000	0	48,270,000	99.29	350,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	364,000,000	284,000,000	271,480,000	271,480,000	0	271,480,000	95.59	12,520,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	37,422,000	12,422,000	12,272,437	12,272,437	0	12,272,437	98.80	149,563
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	103,257,000	92,257,000	89,149,020	89,149,020	0	89,149,020	95.59	4,107,980
511129	Belanja Uang Makan PNS	272,160,000	227,160,000	218,644,000	218,644,000	(104,850)	218,539,150	96.20	8,620,850
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	10,000,000	7,714,000	0	0	0	0	0.00	7,714,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROFINSI : 0199
SATUAN KERJA : 651994
JENIS SATUAN KERJA : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
INSTANSI PUSAT
INSPEKTORAT BPKP
KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 31 Januari 2018
Halaman : 5
Prog.id : lu_lrbstfkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA						% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGENBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
52	BELANJA BARANG										
5212	Belanja Barang Non Operasional	12.256.000	12.256.000	2.974.000	2.974.000	0	2.974.000	24.27	9.282.000		
521211	Belanja Bahan	12.256.000	12.256.000	2.974.000	2.974.000	0	2.974.000	24.27	9.282.000		
5241	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212										
524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43.306.000	43.306.000	33.509.740	33.509.740	0	33.509.740	77.38	9.796.260		
524114	Belanja Perjalanan Biasa	19.200.000	19.200.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	60.94	7.500.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.506.000	62.506.000	45.209.740	45.209.740	0	45.209.740	72.33	17.296.260		
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241										
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	74.762.000	74.762.000	48.183.740	48.183.740	0	48.183.740	64.45	26.578.260		
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3671.002	74.762.000	74.762.000	48.183.740	48.183.740	0	48.183.740	64.45	26.578.260		
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3671	1.144.508.000	1.012.903.000	719.503.125	719.503.125	(1.422.800)	718.080.225	71.03	294.822.775		
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06	1.144.508.000	1.012.903.000	719.503.125	719.503.125	(1.422.800)	718.080.225	71.03	294.822.775		
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	8.143.974.000	7.544.296.000	6.953.778.604	6.953.778.604	(20.862.478)	6.932.916.126	92.17	611.379.874		

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 31-01-18
 Halaman : 1
 Prog.id : lu_irapbskth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
0	RUPIAH MURNI							
01	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP							
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP							
994	Layanan Perkantoran							
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
5111	Pengembalian Belanja Geji dan Tunjangan PNS							
511119	Pengembalian Belanja Pembuatan Gaji PNS	0	0	0	370	370	0,00	0
511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	0	0	104.850	104.850	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	0	105.220	105.220	0,00	0
5124	Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito			12.691.995	6.642.363	19.334.358	0,00	0
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	0	12.691.995	6.642.363	19.334.358	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	0	12.691.995	6.747.593	19.439.578	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	12.691.995	6.747.593	19.439.578	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994	0	0	12.691.995	6.747.593	19.439.578	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670	0	0	12.691.995	6.747.593	19.439.578	0,00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01	0	0	12.691.995	6.747.593	19.439.578	0,00	0
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern							

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELONI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 651994 INSPEKTORAT BPKP
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 31-01-18
Halaman : 2
Prog.id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SID SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH SID SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671	Pemerintah							
001	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP							
52	Laporan Audit, Evaluasi dan Review							
5241	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3671.001	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3671	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.06	0	0	0	1,422,900	1,422,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KP	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	12,681,995	8,170,483	20,852,478	0.00	0

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSISKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2017	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2017	NILAI		
1	2	3	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
132111	PERALATAN DAN MESIN		359	2,114,903,876	0	0	0	0	359	2,114,903,876
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Unit	4	584,817,756	0	0	0	0	4	584,817,756
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	4	49,038,800	0	0	0	0	4	49,038,800
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	1	1,974,717	0	0	0	0	1	1,974,717
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	3	121,025,200	0	0	0	0	3	121,025,200
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	57	112,859,941	0	0	0	0	57	112,859,941
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	10	20,183,126	0	0	0	0	10	20,183,126
3.05.01.99	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	2	2,090,000	0	0	0	0	2	2,090,000
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	145	253,575,530	0	0	0	0	145	253,575,530
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	11	39,660,438	0	0	0	0	11	39,660,438
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	6	55,713,658	0	0	0	0	6	55,713,658
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	17,725,900	0	0	0	0	2	17,725,900
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	4	15,193,243	0	0	0	0	4	15,193,243
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	67	698,417,846	0	0	0	0	67	698,417,846
3.10.01.99	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Buah	7	53,735,000	0	0	0	0	7	53,735,000
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	35	87,792,721	0	0	0	0	35	87,792,721
135121	ASET TETAP LAINNYA		321	22,092,925	0	0	0	0	321	22,092,925
6.01.01.01	BUKU	Buah	318	19,692,925	0	0	0	0	318	19,692,925
6.02.01.02	LUKISAN	Buah	3	3,000,000	0	0	0	0	3	3,000,000
	TOTAL			2,137,596,801	0	0	0	0		2,137,596,801

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBSISKT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI				SALDO PER	
			1 JANUARI 2017	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2017	NILAI		
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL			2,137,596,801			0			2,137,596,801

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Remy
 19751106 199601 1 001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap : LBSESKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	NILAI	BERKURANG	NILAI	KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3							
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,994,000	0	0	0	0	0	1,994,000
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	1	250,000	0	0	0	0	0	250,000
3.05.02.01	MEUBELAIR	2	274,000	0	0	0	0	0	274,000
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	2	130,000	0	0	0	0	0	130,000
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	1	240,000	0	0	0	0	0	240,000
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	5	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
	TOTAL		1,994,000						1,994,000

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Romy
 19751106 199601 1 001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSGSKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2017			
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	PERALATAN DAN MESIN		376	2,116,897,876	0	0	0	0	376	2,116,897,876
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Unit	4	584,817,756	0	0	0	0	4	584,817,756
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUJA	Unit	4	49,038,800	0	0	0	0	4	49,038,800
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	1	1,974,717	0	0	0	0	1	1,974,717
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	Buah	3	121,025,200	0	0	0	0	3	121,025,200
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	57	112,859,941	0	0	0	0	57	112,859,941
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		11	20,433,126	0	0	0	0	11	20,433,126
3.05.01.99	ALAT KANTOR LAINNYA		2	2,090,000	0	0	0	0	2	2,090,000
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	147	253,849,530	0	0	0	0	147	253,849,530
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	2	130,000	0	0	0	0	2	130,000
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	1	1,108,000	0	0	0	0	1	1,108,000
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	11	39,660,438	0	0	0	0	11	39,660,438
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	7	55,953,658	0	0	0	0	7	55,953,658
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	17,725,900	0	0	0	0	2	17,725,900
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	4	15,193,243	0	0	0	0	4	15,193,243
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	67	698,417,846	0	0	0	0	67	698,417,846
3.10.01.99	KOMPUTER UNIT LAINNYA		7	53,735,000	0	0	0	0	7	53,735,000
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		40	88,892,721	0	0	0	0	40	88,892,721
135121	ASET TETAP LAINNYA		321	22,692,925	0	0	0	0	321	22,692,925
6.01.01.01	BUKU	Buah	318	19,692,925	0	0	0	0	318	19,692,925
6.02.01.02	LUKISAN	Buah	3	3,000,000	0	0	0	0	3	3,000,000

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 2
 Kode Lap. : LBSGSKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL			2,139,590,801		0	0	0		2,139,590,801

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antidnius Rody
 19751106 199601 1 001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSSSKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	URAIAN	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER
				1 JANUARI 2017	KUANTITAS	BERTAMBAH	BERKURANG	
				4		5	6	KUANTITAS
1		2	3	0	0	0	0	7
		TIDAK ADA DATA		0	0			0

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Rolly
 19751106 199601 1 001



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSTSKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 INSPEKTORAT
 ANTONIUS RONY
 19751106 199601 1 001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSKSKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	JUMLAH SD 1 JANUARI 2017		PENAMBAHAN		KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF		JUMLAH SD 31 DESEMBER		KETERANGAN
		NILAI	3	NILAI	4	NILAI	5	NILAI	6	
1	2									7
...	TIDAK ADA DATA		0		0		0		0	
	TOTAL		0		0		0		0	

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Roay
 19751106 199601 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LPSISIKS

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017						NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN			2,114,903,876	1,776,941,798	135,717,058	0	1,912,658,856	202,245
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENJUPANG	Unit	4	584,817,756	491,433,878	26,681,108	0	518,114,986	66,702
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	4	49,038,800	49,038,800	0	0	49,038,800	
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	1	1,974,717	1,974,717	0	0	1,974,717	
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	3	121,025,200	82,525,200	11,000,000	0	99,525,200	27,500
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	57	112,859,941	110,283,941	736,000	0	111,019,941	1,840
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	10	20,183,126	20,183,126	0	0	20,183,126	
3.05.01.99	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	2	2,090,000	2,090,000	0	0	2,090,000	
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	145	253,575,530	253,575,530	0	0	253,575,530	
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	1	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	11	39,660,438	35,194,438	1,276,000	0	36,470,438	3,190
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	6	55,713,658	55,713,658	0	0	55,713,658	
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	17,725,900	17,725,900	0	0	17,725,900	
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	4	15,193,243	15,193,243	0	0	15,193,243	
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	67	698,417,846	541,387,896	78,643,950	0	620,031,846	78,386
3.10.01.99	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Buah	7	53,735,000	53,735,000	0	0	53,735,000	
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	35	87,792,721	45,786,471	17,380,000	0	63,166,471	24,626
	TOTAL			2,114,903,876	1,776,941,798	135,717,058	0	1,912,658,856	202,245

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRAKOMPITABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017						NILAI BUKU
			KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Rony
 Antolius Rony
 19751106 199601 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LPSISKT

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017						TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13211	PERALATAN DAN MESIN									
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENGUMPANG	Unit	359	2.114.903,876	1.776.941,798	135.717,058	0	1.912.658,856	202,245	
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	4	584.817,756	491.433,878	26.681,108	0	518.114,986	66,702	
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	4	49.038,809	49.038,800	0	0	49.038,800		
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	1	1.974,717	1.974,717	0	0	1.974,717		
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	3	121.025,200	82.525,200	11.000,000	0	93.525,200	27,500	
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	57	112.859,941	110.283,941	736,000	0	111.019,941	1,840	
3.05.01.99	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	10	20.183,126	20.183,126	0	0	20.183,126		
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	2	2.090,000	2.090,000	0	0	2.090,000		
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	145	253.575,530	253.575,530	0	0	253.575,530		
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE	Buah	1	1.100,000	1.100,000	0	0	1.100,000		
)	Buah	11	39.660,438	35.194,438	1.276,000	0	36.470,438	3,190	
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	6	55.713,658	55.713,658	0	0	55.713,658		
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	17.725,900	17.725,900	0	0	17.725,900		
3.10.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	4	15.193,243	15.193,243	0	0	15.193,243		
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	67	698.417,846	541.387,896	78.643,950	0	620.031,846	78,386	
3.10.01.99	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Buah	7	53.735,000	53.735,000	0	0	53.735,000		
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	35	87.792,721	45.786,471	17.380,000	0	63.166,471	24,626	
	TOTAL			2.114.903,876	1.776.941,798	135.717,058	0	1.912.658,856	202,245	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017					TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU		
		KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI			BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI
1		2		4	5	6	7	8	9	10

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antohius Ropy
 19751106 199601 1 001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017							NILAI BUKU
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
132111	PERALATAN DAN MESIN		11	1,994,000	1,719,000	275,000	0	1,994,000		
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	1	250,000	250,000	0	0	250,000		
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	2	274,000	274,000	0	0	274,000		
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	2	130,000	130,000	0	0	130,000		
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	1	240,000	240,000	0	0	240,000		
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		5	1,100,000	825,000	275,000	0	1,100,000		
TOTAL				1,994,000	1,719,000	275,000	0	1,994,000		

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 INSPEKTORAT
 ANTONIUS ROMY
 19751106 199601 1 001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017					NILAI BUKU	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		11	1,994,000	1,719,000	275,000	0	1,994,000	
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	1	250,000	250,000	0	0	250,000	
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	2	274,000	274,000	0	0	274,000	
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	2	130,000	130,000	0	0	130,000	
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	1	240,000	240,000	0	0	240,000	
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		5	1,100,000	825,000	275,000	0	1,100,000	
	TOTAL			1,994,000	1,719,000	275,000	0	1,994,000	

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Rony
 19751106 199601 1 001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017							NILAI BUKU
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
13211	PERALATAN DAN MESIN		370	2,116,897,876	1,778,660,798	135,992,058	0	1,914,652,856	202,245	
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Unit	4	584,817,756	491,433,878	26,681,108	0	518,114,986	66,702	
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	4	49,038,800	49,038,800	0	0	49,038,800		
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	1	1,974,717	1,974,717	0	0	1,974,717		
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	Buah	3	121,025,200	82,525,200	11,000,000	0	93,525,200	27,500	
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	57	112,859,941	110,283,941	736,000	0	111,019,941	1,840	
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	11	20,433,126	20,433,126	0	0	20,433,126		
3.05.01.99	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	2	2,090,000	2,090,000	0	0	2,090,000		
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	147	253,849,530	253,849,530	0	0	253,849,530		
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	2	130,000	130,000	0	0	130,000		
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	1	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000		
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	11	39,660,438	35,194,438	1,276,000	0	36,470,438	3,190	
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	7	55,953,658	55,953,658	0	0	55,953,658		
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	17,725,900	17,725,900	0	0	17,725,900		
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	4	15,193,243	15,193,243	0	0	15,193,243		
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	67	698,417,846	541,387,896	78,643,950	0	620,031,846	78,386	
3.10.01.99	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Buah	7	53,735,000	53,735,000	0	0	53,735,000		
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	40	88,892,721	46,611,471	17,655,000	0	64,266,471	24,626	
	TOTAL			2,116,897,876	1,778,660,798	135,992,058	0	1,914,652,856	202,245	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017					TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
			KUANTITAS	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Antonius Rody

197511061996011001



LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
 (B P Y B D S)
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBPYBDSIKS

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JULI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antohius Rorly
 197511061996011001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
 (B P Y B D S)
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBPYBDSISIKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL									

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Romy
 19751106 199601 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG HILANG
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHISKS

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JULI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
		KUANTITAS 4	NILAI 5	BERTAMBAH KUAN- TITAS 6	NILAI 7	BERKURANG KUAN- TITAS 8	NILAI 9	KUANTITAS 10	NILAI 11
1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antohius Rody

19751106 199601 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG HILANGTAHUNAN
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHISKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI						SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL											

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 INSPEKTORAT
 Antomius Rony
 19751106-199601 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG

SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHISKS

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JULI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS 4	NILAI 5	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS 10	NILAI 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0						0

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Rony
 19751106 199601 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHISKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Roby
 19751106-199601 1 001

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 INSTANSI PUSAT

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHDKTPIS

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JULI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS 4	NILAI 5	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS 10	NILAI 11
	URAIAN 2	3	KUANTITAS 4	NILAI 5	KUANTITAS 6	NILAI 7	KUANTITAS 8	NILAI 9	KUANTITAS 10	NILAI 11
...	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN BARANG HIBAH DK/TPTAHUNAN
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 02-01-2018
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBMNHDKTPIS

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994 INSPEKTORAT BPKP

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL									

Jakarta, 31 Desember 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

 Antonius Roby
 197511061996011001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA UAKPB : INSPEKTORAT BPKP
KODE UAKPB : 089.01.01.651994.000.KP

Kode	Uraian	
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	1,225,270
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	125,270
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	636,840
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	14,325,600
1.01.03.01.007	Penggaris	20,000
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	363,368
1.01.03.01.010	Alat Perekat	419,650
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	13,683,300
1.01.03.02.001	Kertas HVS	5,232,616
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	56,100
1.01.03.02.003	Kertas Cover	733,650
1.01.03.02.004	Amplop	1,771,000
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	374,000
1.01.03.03.999	Bahan Cetak Lainnya	3,240,000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	40,818,300
1.01.03.04.005	Disket	277,200
1.01.03.06.010	Batu Baterai	834,400
JUMLAH BARANG KONSUMSI		84,136,564
TOTAL		84,136,564

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Antonius Rony
19751106 199601 1 001

Jakarta, 31 Desember 2017
Petugas Pengelola Persediaan

Harisun Media Saputra
19650529 198503 1 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 08-01-2018
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994.000 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	84,136,564 ✓
132111	Peralatan dan Mesin	2,114,903,876 ✓
135121	Aset Tetap Lainnya	22,692,925 ✓
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,912,658,856) ✓
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
J U M L A H		309,074,509

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Rony
Antonius Rony

19751106 199601 1 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017
TAHUN ANGGARAN 2017

Tanggal : 08-01-2018
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 089.01.00.651994.000 INSPEKTORAT BPKP

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	84,136,564	0	84,136,564
132111	Peralatan dan Mesin	2,114,903,876	1,912,658,856	202,245,020
135121	Aset Tetap Lainnya	22,692,925	0	22,692,925
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
J U M L A H		2,221,733,365	1,912,658,856	309,074,509

Jakarta, 31 Desember 2017

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Antonius Rohy
19751106 199601 1 001

